

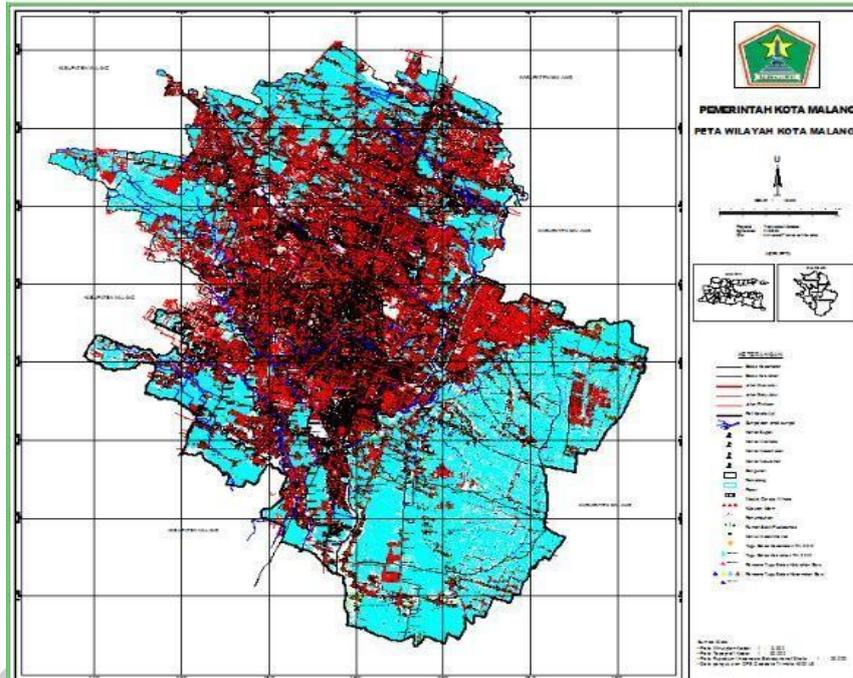
BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.2.1. Gambaran Umum Kota Malang

Sebagai komponen dari pusat pendidikan dalam Kota, wilayah Kota Malang menjadi rekomendasi bagi masyarakat yang terletak di wilayah Jawa Timur. Dengan kandidat pusat Kota setelah Kota Surabaya. Terletak 90 kilometer ke selatan Surabaya, Malang adalah sebuah Kota memiliki lokasi dataran tinggi dengan suhu cukup dingin. Kota Malang terletak di daerah berbukit dengan ketinggian berkisar 440.667 meter di atas permukaan laut, membentang di wilayah pegunungan geografis, di sebelah timur terletak Gunung Semeru, Di sebelah barat terdapat Gunung Kawi dan Panderman, sementara di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno. Beracuan dalam posisi gunung tersebut, Kota Malang memiliki berbagai arus sungai di antaranya yakni Sungai Sukun, Metro, Brantas, Amprong, dan Bango.

Berpatokan dalam tatanan administratif, Kota dingin menjadi panggilan lain dari Kota Malang karena lokasi wilayahnya berada pada datran tinggi dengan luas wilayah 111,08 km². Luas wilayah Malang Kota mencakup lima kecamatan yakni : Kecamatan Sukun, Blimbing, Kedungkandang Klojen, , dan Lowokwaru. Terkait akumulasi total penduduk Kota Malang tahun 2022 mencakup 846.126 jiwa, serta Kota Malang disebut Kota pendidikan karena ada 57 kampus dan terdiri dari +800.000 mahasiswa, lalu disebut juga Kota perdagangan dan jasa ada +29% kontribusi dalam PDRB yang terdiri tas + 8.000 UMKM, dan terakhir Kota Malang disebut Kota Kreatif Digital ada 171 startup digital dan sebanyak 24% porsi wisatawan ke Jawa Timur menuju Malang Raya.



Gambar 3. 1. Peta Wilayah Kota Malang

Sumber : Malangkota.go.id

3.1.1 Kondisi Topografi

Dengan elevasi berkisar antara 440 hingga 667 meter di atas permukaan laut, kondisi topografi terletak pada ketinggian tersebut, sehingga terdapat potensi alam dan iklim yang memadai sebagai tempat wisata. terletak pada tengah kabupaten Malang, dengan Lokasi astronomis terletak di antara lintang selatan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ dan bujur timur $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$, yang mencakup wilayah Malang Kota. terletak di tengah berbagai macam pegunungan, diantaranya :

- a. Area lokasi Gunung Arjuno berada tepat disebelah Utara
- b. Area lokasi Gunung Semeru berada tepat disebelah Timur
- c. Area lokasi Gunung Kelud berada tepat disebelah Selatan
- d. Area lokasi Gunung Panderman dan Gnung Kawi berada tepat disebelah Barat

Keadaan geologi wilayah Kota Malang meliputi keadaan tanah di wilayahnya anantara lain di bagian selatan terdapat dataran tinggi yang luas, ideal untuk kegiatan industri. Sementara itu, di bagian utara terdapat dataran tinggi yang subur, cocok untuk kegiatan pertanian. Di bagian timur, terdapat

dataran tinggi dengan kondisi kurang subur, sedangkan di bagian barat, dataran tinggi yang sangat luas dijadikan sebagai wilayah pendidikan..

Di wilayah Kota Malang, terdapat empat jenis tanah yang dapat diidentifikasi, meliputi Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha, Mediterania coklat seluas 1,225,160 Ha, Asosiasi latosol coklat kemerahan dan grey coklat dengan luas 1,942,160 Ha, serta Asosiasi andosol coklat dan grey humus yang mencakup area seluas 1,765,160 Ha. Secara umum, struktur tanah di Kota ini tergolong baik, walaupun perlu diperhatikan penggunaan jalan tanah andosol yang rentan terhadap erosi, khususnya di Kecamatan Lowokwaru dengan kemiringan relatif sebesar 15%.

Bedasarkan pada keunggulan pada potensi alam dan iklim, perpindahan penduduk dari berbagai daerah sangat beragam, sehingga penduduk asli berasal dari bermacam etnis (Mayoritas dari wilayah Jawa dan Madura, sebagian penduduk lainnya dari keturunan Cina dan Arab). Beragam etnis yang dimiliki oleh Kota Malang berpengaruh pada seni tradisional. Sebagian budaya yang telah terkenal ialah tari penglipatan, tetapi sekarang semakin menepi dengan kedatangan seni modern. Berkaitan dengan umat beragama, mayoritas penduduk berasal dari umat Islam daripada orang Katolik, Kristen, serta sebagian kecil dari umat Hindu serta umat Buddha. Berbagai macam umat beragama tidak menutup kemungkinan penduduk Kota Malang dikenal dengan keharmonisan dan kerja sama antar umat beragama dalam meningkatkan Kota. Tidak sedikit tempat ibadah yang didirikan di Kota Malang ketika era kolonial yang diantaranya termasuk Masjid Jami' yang merupakan Masjid Agung Kota Malang, serta keberadaan Gereja yang berlokasi di alun-alun, ipe kayutangan.

3.1.2 Kondisi Fisiografis

Berbagai bukit dan pegunungan menjadi ciri khas Kota Malang yang masuk dalam wilayah gunung selatan. Beragam puncak gunung Gunung Arjuno (3999m), diantaranya Gunung Anjasmoro (2,777m) terletak pada posisi utara, wilayah pegunungan kapur (650m) terletak pada posisi selatan, keberadaan Gunung Kawi (2.625m) Gunung Kelud (1.731m) terletak pada posisi barat, serta keberadaan Gunung Bromo (2,392 m), Gunung Semeru

(3,676) terletak pada posisi timur.

a. Wilayah Perbukitan

Kondisi pada wilayah perbukitan memiliki tinggi sekitar antara 500-999, di atas permukaan laut (mdpl). Pada area bukit rendah yakni daratan yang cukup datar, berdasarkan ketinggian yang berbeda sekitar 5-25m, yakni dalam kisaran tinggi 200-499 mdpl. Persebaran area bebukitan Kota Malang memiliki kisaran tinggi 500-999 mdpl pada bagian timur kecamatan Kedungkandang. Area perbukitan rata-rata memiliki lereng kemiringan antara 15-40°. Bentuk area berbukitan yakni bukit-bukitan generasi dengan batu tufa dan juga batu pasir. Kondisi fisik dalam bentuk bukit dengan koples perumahan buring satelit beserta buring hill.

b. Wilayah Daratan Tinggi.

Area wilayah dengan tinggi Antara ketinggian 200 hingga 499 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi meliputi wilayah Sukun, Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Lowokwaru dan Bagian barat. Dataran tinggi memiliki beragam tingkat kemiringan, area lembah lereng bukit sekitar 8-15°, sedangkan area biasa memiliki kemiringan 2-5°.

Kondisi area fisik berbagai dasar batuan terdiri dari bahan alluvial kelabu pokok batuan sedimen. Berdasarkan intensitas hujan sekitar tahunan, terjadi musim hujan pada bulan Oktober hingga Februari, selain itu kondisi Waktu kemarau terjadi mulai bulan Maret sampai September. Curah hujan 1000-1500 mm/th biasa terjadi pada dataran tinggi. Angin pada periode Oktober hingga April bertiup dari arah barat laut dan dapat menyebabkan hujan atau kelembaban, sementara pada bulan April hingga Oktober, angin berasal dari tenggara dan dapat mengakibatkan kondisi kering atau musim kemarau. Kegiatan penduduk tidak terlalu berpengaruh terhadap deposisi, karena dataran tinggi cenderung memiliki ketebalan udara yang relatif tipis.

3.1.3 Kondisi Klimatologi

Penetapan kondisi klimatologi memiliki iklim tropis sebagai bagian dari negara Indonesia. Kondisi cuaca di Kota Malang pada tahun 2008 mencatatkan suhu udara rata-rata antara 22,7°C hingga 25,1°C, dengan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Kelembapan udara

memiliki kisaran rata-rata antara 79% hingga 86%, dengan nilai maksimum mencapai 99% dan minimum mencapai 40%. Sebagaimana umumnya di daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengalami dua musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan observasi dari stasiun klimatologi Karangploso, curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Februari, November, dan Desember, sementara curah hujan relatif rendah pada bulan Juni dan September. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Mei, September, dan Juli

3.1.4 Wilayah Administratif

Dalam konteks administratif, Kota Malang dianggap sebagai kandidat kedua setelah Kota Surabaya di Jawa Timur. Hal ini berdasarkan pada luas wilayahnya yang mencapai 11,005,66 hektar, setara dengan 110,06 km². Menurut catatan administratif provinsi Jawa Timur, Kota Malang ditempatkan di bagian tengah dari wilayah administratif Kabupaten Kota Malang, sesuai dengan lokasi administratif yang ditentukan, yakni :

- a. **Timur** terdapat wilayah kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang, merupakan bagian dari Malang kabupaten.
- b. **Utara** terdapat wilayah kecamatan Karangploso dan kecamatan Singosari, merupakan bagian dari Malang kabupaten.
- c. **Barat** terdapat wilayah kecamatan Wagir dan kecamatan Dau, merupakan bagian dari Malang kabupaten.
- d. **Selatan** terdapat wilayah kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji, merupakan wilayah bagian dari Malang kabupaten.

Berkesinambungan dengan ketentuan Kota Malang tercatat secara administratif menjadi 5 kecamatan diantaranya, yakni

- a. Kec. Sukun
- b. Kec. Klojen
- c. Kec. Blimbing
- d. Kec. Kedungkandang, dan
- e. Kec. Lowokwaru

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)
1	Kedungkandang.	39.852
2	Sukun.	20970
3	Klojen.	8.830
4	Blimbing.	17.770
5	Lowokwaru.	22.600
Jumlah		110.060

Tabel 3. 1. Luas wilayah perkecamatan Kota Malang

Sumber : <https://malangKota.bps.go.id/>

3.1.5 Kondisi Demografi

BPS Malang Kota pada tahun 2022 telah mencatat jumlah penduduk berdasarkan data mencapai 846.126 jiwa, dengan pembagian berkomposisi 425.229 jiwa penduduk perempuan dan 420.897 jiwa penduduk laki-laki.

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedungkandang	104.810	103.931	208.741
2	Sukun	98.260	98.429	196.689
3	Klojen	45.836	48.203	94.039
4	Blimbing	90.803	91.890	182.693
5	Lowokwaru	81.188	82.776	163.964
Jumlah		420.897	425.299	846.126

Tabel 3. 2. Jumlah Penduduk di Kota Malang

Sumber : <https://malangKota.bps.go.id/>

Penyajian pada tabel diatas menampilkan bahwa, distribusi status kependudukan untuk Kota Malang tersebar secara rapi pada setiap kecamatan. Penyebaran penduduk di kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah populasi tertinggi daripada kecamatan yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, menjadikan wilayah kecamatan Lowokwaru sebagai pusat pembangunan dan pengembangan di Malang Kota. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki banyak institusi pendidikan tinggi, baik yang bersifat negeri maupun swasta. Situasi ini menyebabkan kecamatan Lowokwaru menjadi tempat tinggal bagi banyak pendatang, terutama didominasi oleh mahasiswa

yang berasal dari luar Kota Malang.

3.1.6 Visi dan Misi Kota Malang

Untuk merealisasikan serangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di wilayah Kota Malang pada periode 2018-2023, ini terkait dengan visi WaliKota dan Wakil WaliKota Malang untuk periode tersebut yakni

“Kota Malang Bermartabat”

Inti dari memiliki martabat adalah mencerminkan dan menerapkan tugas serta tanggung jawab manusia sebagai pemimpin bagi masyarakat yang dipimpinnya. Martabat ini merujuk pada nilai-nilai harga diri kemanusiaan yang mencerminkan kemuliaan. Dengan tujuan lain, Kota Malang mampu mengemban Kota bermartabat maka dari itu, perlu untuk merealisasikan prinsip yang tertib, aman, indah, dan bersih yang dapat membuat kondisi masyarakat sejahtera, mandiri, berbudaya, makmur, berpendidikan dan juga mampu memiliki pemahaman atas nilai agama. Berharap Kota Malang mampu memiliki keunggulan pada semua aspek dan mampu berkompetitif dalam menempatkan diri merka dalam Kota terpadang dengan berbagai macam pencapaian. *Baladun Thoibatun Wa Robbun Ghofur* dapat dipahami sebagai penciptaan suatu situasi, keadaan, struktur, dan kepribadian yang luhur untuk Kota Malang beserta seluruh penduduknya.

Misi adalah suatu rumus dasar terkait upaya yang segera terlaksanakan dalam pencapaian suatu visi, berharap mampu memparkan visi telah diinginkan dan memilah upaya apa saja yang dapat terlaksana. Dalam upaya mewujudkan visi "Kota Malang Bermartabat", terdapat empat misi yang menjadi fokus dalam pembangunan daerah. Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar untuk seluruh warga. Misi kedua menargetkan penciptaan Kota yang produktif dan kompetitif berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan, dan terintegrasi. Misi ketiga berusaha menciptakan Kota yang harmonis dan toleran, dengan landasan pada keberagaman dan dukungan terhadap masyarakat rentan dan prinsip kesetaraan gender. Sementara itu, misi keempat bertujuan memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

pemerintah yang berjalan sesuai hukum, profesional, dan akuntabel.

Dengan tujuan awal ini, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Peningkatan mutu pendidikan diwujudkan melalui perekrutan guru baru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dianggap sebagai langkah yang sangat penting. Langkah kedua adalah memastikan stabilitas daya beli dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Langkah ketiga adalah mengarahkan program-program menuju pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Terakhir, fokus juga diberikan pada penguatan industri kreatif masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi.

3.2.2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang

3.2.1. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2004, Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2004 yang mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang.

Pada tahun 2008, Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) bergabung dengan sektor Dinas Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi untuk membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 4 Juli 2008. Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Wali Kota Malang Nomor 49 Tahun 2008 mengenai Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas ini terstruktur dalam 4 (empat) bidang, yakni Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Bidang Aplikasi Telematika, dan Bidang Informasi Publik.

Pada tahun 2017, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2016 diberlakukan, mengakibatkan perubahan struktural dalam Dinas Kominfo Malang. Bidang-bidang yang terpengaruh meliputi Bidang Informasi Publik,

Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik, serta Bidang Komunikasi dan Persandian.

Kemudian, pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, terjadi restrukturisasi yang mengubah jumlah bidang dalam dinas tersebut. Awalnya terdiri dari 4 (empat) bidang, kini menyusut menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Statistik dan Persandian, serta Bidang Aplikasi Informatika.

3.2.2. Visi dan Misi

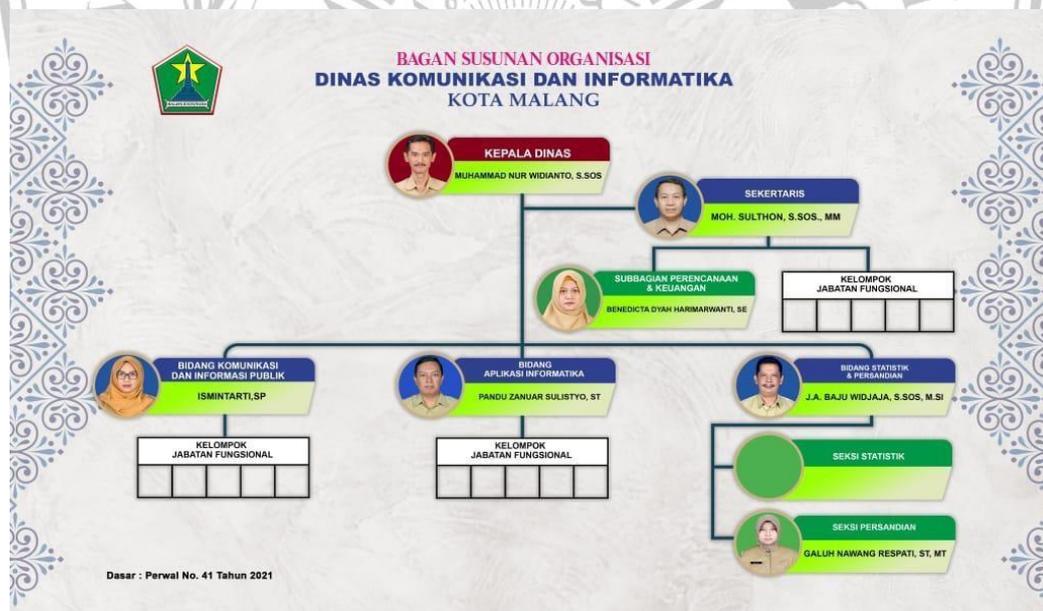
Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melibatkan prinsip-prinsip seperti informatif, inovatif, fleksibel, orisinal, cangguh, integritas, terukur, dan faktual. Penerapan prinsip informatif di Kota Malang ini merujuk pada karakter Kota Malang yang disadari oleh penduduknya, memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengakses serta memanfaatkan informasi. Hal ini juga mencakup penyebaran informasi dan penggunaan informasi sebagai tambahan nilai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pertama, Informatif pada konteks ini mengacu pada kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan tujuan tertentu sejalan dengan perkembangan era yang terus maju, membuka berbagai peluang baru, dan memiliki orientasi untuk masa depan. Kedua, Fleksibel diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi, baik dalam kerjasama tim maupun secara individu. Ketiga, Orisinal atau original diartikan sebagai ide yang dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi, situasi, serta kearifan lokal. Keempat, Maju diartikan sebagai kemampuan untuk terus berkembang dan memiliki semangat yang tidak mudah puas dengan pencapaian saat ini. Kelima, terukur diartikan sebagai akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, integritas pada konteks ini mencakup konsistensi dalam perilaku dan prinsip yang dipegang, serta keteguhan dalam memegang nilai-nilai kepercayaan leluhur. Dan yang terakhir, Ketujuh, faktual diartikan sebagai penyediaan data dan informasi

yang selalu terkini dan sesuai dengan realitas di lapangan.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang adalah mencapai birokrasi pelayanan komunikasi dan informatika yang memiliki moralitas yang tinggi, mengoptimalkan sistem pelayanan pemerintahan berbasis e-governance yang terintegrasi, memenuhi kebutuhan informasi layanan kepada masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan menyajikan informasi yang akurat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, memperkuat pengolahan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kemitraan, lembaga komunikasi, serta menyediakan layanan informasi publik yang berlandaskan kearifan lokal. Selain itu, misi ini bertujuan mencapai profesionalisme pelayanan dalam aspek telekomunikasi dan posisi yang diemban.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG



Gambar 3. 2. Bagan susunan organisasi Dinas Komuikasi dan Informatika Kota Malang

Sumber : *Bagan Susunan Organisasi Dinas Kominfo – Pemerintah Kota Malang*. (kominfo.malangKota.go.id)

3.2.3. Landasan Hukum

a. Dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh

WaliKota dan Wakil WaliKota, perlu dilakukan penataan ulang terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah;

- b. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, serta menciptakan organisasi yang sesuai dengan ukuran dan fungsi yang tepat, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. Sejalan dengan pertimbangan tersebut pada poin a dan b, maka diperlukan penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Modifikasi Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - iii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang. Nomor 23. Tahun 2014. tentang Pemerintahan. Daerah. (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 58, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia. Nomor 5679);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor. 15 Tahun. 1987 tentang. Perubahan Batas. Wilayah Kotamadya. Daerah Tingkat. II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat. II Malang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun. 1987 Nomor. 29, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia. Nomor 3354);
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 114, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5887);
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang. Pembinaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor. 73, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6041);
- viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 Tahun 2017 tentang. Pedoman Nomenklatur Perangkat. Daerah Provinsi dan Daerah. Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Tahun. 2017 Nomor. 197);
- ix. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 99 Tahun 2018 tentang. Pembinaan dan. Pengendalian Penataan. Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 1539);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 11 Tahun 2019 tentang. Perangkat Daerah yang Melaksanakan. Urusan Pemerintahan di Bidang. Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun. 2019 Nomor. 194)

3.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki tanggung jawab utama yang mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas ini bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi kebijakan di sektor-sektor tersebut. Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melibatkan berbagai fungsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Fungsi yang dimaksud di atas mencakup berbagai aspek, seperti perumusan kebijakan Daerah dalam ranah Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Selain itu, fungsi tersebut juga mencakup pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik. Selain itu, terdapat pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Fungsi tersebut juga mencakup layanan keamanan informasi e-government, sistem komunikasi intra pemerintah, manajemen data dan informasi e-government, akses internet dan intranet, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik, serta suplemen yang terintegrasi. Selain itu, ada integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, Government Chief Information Officer, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota. Fungsi juga melibatkan Persandian, statistik sektoral, pelaksanaan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemungutan retribusi Daerah, koordinasi dan pelaksanaan program, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Terakhir, fungsi mencakup pengendalian pelaksanaan program

di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, pengelolaan administrasi umum, pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional, serta penyelenggaraan UPT.

Secara singkat, fungsi utamanya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Tugasnya mencakup manajemen informasi dan dokumentasi, koordinasi dalam sektor pos dan telekomunikasi, serta memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan membangun kemitraan media melalui kegiatan sosialisasi.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan telekomunikasi di wilayah perKotaan mencakup pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan layanan telekomunikasi, seperti warung telekomunikasi dan warung seluler. Penerapan standar pelayanan minimal, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan mengacu pada standar pelayanan publik, serta mengikuti standar operasional dan prosedur. Informasi hasil pembangunan dan data terkait layanan publik disampaikan melalui website pemerintah daerah dengan skala yang luas. Selain itu, memberdayakan dan memberikan pembinaan kepada pemegang jabatan fungsional, melaksanakan tugas pokok, dan melaporkan aktivitas sesuai dengan tupoksi. Juga, menjalankan fungsi lain yang ditetapkan oleh waliKota sesuai dengan peruntukannya.

3.2.5. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Diskominfo Kota Malang sesuai dengan keinginan, perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada sasaran utama. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan merujuk pada pernyataan visi dan misi, tetapi tetap mempertimbangkan strategi lain. Diskominfo Kota Malang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan komitmen dan integrasi seluruh pejabat yang melaksanakan tugas pokoknya di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta adanya data pendukung. Perkembangan master plan e-governance, pengembangan

sistem dengan layanan kedinasan yang memiliki tingkat integritas tinggi, serta kinerja layanan publik berbasis online yang baik, juga menjadi fokus. Sistem keamanan komunikasi dan informatika juga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan tujuan di atas, diperlukan penetapan sasaran, termasuk peningkatan kapasitas sistem layanan pemerintahan yang kompeten dan profesional, perkembangan sistem pelayanan pemerintah berbasis elektronik, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan penerapan, serta peningkatan kualitas layanan aplikasi e-governance pada layanan publik. Sistem dengan aplikasi yang terintegrasi juga perlu dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

